

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perlu diadakan penyesuaian ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang **Pokok-pokok** Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, **Tambahan** Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, **Tambahan** Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 September 2003 Nomor 15 Tahun 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Dengan Mencabut : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah ;
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara ;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini menetapkan Pembentukan Sekretariat Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten ;
2. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
3. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kabupaten ;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah ;

b. Asisten Tata Praja, membawahkan :

1) Bagian Pemerintahan, membawahkan :

- a) Subbagian Pemerintahan Umum ;
- b) Subbagian Pemerintahan Desa ;

2) Bagian Pertanahan, membawahkan :

- a) Subbagian Sengketa Tanah ;
- b) Subbagian Pengendalian dan Pendayagunaan Tanah ;

3) Bagian Hukum, membawahkan :

- a) Subbagian Perundang-undangan ;
- b) Subbagian Bantuan Hukum ;
- c) Subbagian Dokumentasi Hukum ;

4) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :

- a) Subbagian Pelayanan Informasi dan Pemberitaan ;
- b) Subbagian Dokumentasi Informasi ;

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:

1) Bagian Perekonomian, membawahkan :

- a) Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perkreditan Rakyat ;
- b) Subbagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan ;

2) Bagian Sosial, membawahkan :

- a) Subbagian Kesejahteraan Rakyat ;
- b) Subbagian Peranan Wanita ;

- 3) Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - a) Subbagian Pengendalian Pembangunan ;
 - b) Subbagian Analisis dan Pelaporan Pembangunan ;
- d. Asisten Administrasi, membawahkan :
 - 1) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Subbagian Penyusunan Anggaran ;
 - b) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi ;
 - c) Subbagian Perbendaharaan dan Kas Daerah ;
 - 2) Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahkan :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ;
 - b) Subbagian Pendayagunaan Aparatur ;
 - c) Subbagian Kepegawaian ;
 - 3) Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi ;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol ;
 - c) Subbagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penempatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan beban tugas, kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 September 2003

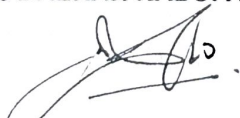
BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 45